

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi saat ini, instansi pemerintah semakin dituntut untuk menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan diperlihatkan dari kemampuannya dalam menyampaikan informasi dengan terbuka, seimbang, serta merata bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sehingga dapat memperoleh keputusan yang wajar. Oleh karena itu, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, serta menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik, serta melembaga, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasarannya (Safitri, 2020).

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaksanakan tugas pokok, yaitu menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas. Dengan demikian, tidak hanya memperhatikan peningkatan kinerja, tetapi instansi pemerintah juga diwajibkan dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam sistem pertanggungjawaban, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan susunan yang sistematis dimana sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaannya guna perbaikan kinerja di masa depan. Dengan demikian, sistem

akuntabilitas kinerja pemerintah harus memperlihatkan terlaksananya kinerja instansi pemerintah secara aktual (Manullang dan Abdullah, 2019).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan dalam sebuah laporan yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bertujuan memperlihatkan penerapan rencana strategi dalam pelaksanaan tugas pokok pada perangkat daerah di setiap organisasi, sehingga diharapkan melalui penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan (Aprilianti, dkk, 2020).

Dalam pengelolaan pemerintah yang berakuntabilitas, anggaran menjadi hal yang sangat penting dan relevan dalam kinerja pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2002), memanfaatkan sumber daya dengan ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata dalam mencapai akuntabilitas publik merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran. Yulianto (2019) menyatakan bahwa semakin meningkat kejelasan sasaran anggaran, maka akan semakin meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, dalam merancang program untuk mencapai tujuan instansi pemerintah, perlu adanya sasaran anggaran yang jelas.

Faktor yang menjadi hal kedua dalam mencapai kinerja yang berakuntabilitas adalah menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Fitrawati, dkk (2017), menyatakan kegiatan pengendalian internal harus efektif dan

efisien agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Selain itu, hal yang menjadi faktor ketiga dalam mencapai kinerja yang berakuntabilitas adalah sistem pelaporan. Dalam menciptakan akuntabilitas, laporan keuangan adalah satu hal yang sangat penting. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil keputusan (Safitri, 2020). Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan dalam memonitor dan mengendalikan kinerja manajer dalam menerapkan anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan sebagai variabel independen serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Suhaesti (2016) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkalis). Penelitian terdahulu oleh Fitrawati, dkk (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (survei pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong). Penelitian terdahulu oleh Yulianto (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pati.

Penelitian terdahulu oleh Pratama, dkk. (2019) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh, dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. Penelitian terdahulu oleh Aprilianti, dkk. (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan merupakan topik yang menarik dalam penelitian akuntansi sektor publik. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti ingin menguji kembali penelitian yang hasilnya tidak konsisten, yaitu mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Pratama, dkk. (2019) dan Aprilianti, dkk (2020), serta mengacu pada peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti berkeinginan menguji kembali pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada objek yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batam sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batam dikarenakan berdasarkan sumber mediacenter.batam.go.id, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Batam mendapatkan predikat B hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2019. Pada

tahun 2017, nilai yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam sebesar 61,05 poin. Sementara pada tahun 2019, nilai yang diperoleh adalah sebesar 64,83 poin. Meski masih pada kategori B, dari sisi nilai terdapat adanya peningkatan. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga diperlukan adanya perbaikan sistem akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Batam, seperti menyempurnakan sasaran strategis hingga level individu, menyelesaikan target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh OPD, memonitor dan mengevaluasi secara berkala kinerja OPD demi mendorong peningkatan kinerja, dan pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Batam”. Diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang menyebabkan Pemerintah Kota Batam masih mendapatkan predikat B dalam hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah daerah dituntut menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja kepada *stakeholders* untuk menciptakan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Batam pada tahun 2019 masih harus melakukan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Batam, seperti menyempurnakan sasaran strategis hingga level individu, menyelesaikan target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh

OPD, memonitor dan mengevaluasi secara berkala kinerja OPD demi mendorong peningkatan kinerja, dan pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Batam?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Batam?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali penelitian yang hasilnya tidak konsisten dengan variabel independen, yaitu pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan Pratama, dkk. (2019) dan Aprilianti, dkk (2020). Selain itu, penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Namun, penulis memilih objek yang berbeda, yaitu Organisasi Pemerintah Daerah di Kota Batam.

1.4. Batasan Penelitian

Adapun Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi terbatas hanya dalam ruang lingkup OPD Kota Batam.

2. Hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin peneliti berikan adalah:

1. Kontribusi Teori

Melalui penelitian ini diharapkan penulis memberikan manfaat sebagai referensi dan pertimbangan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan akan membantu organisasi perangkat daerah di Kota Batam dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan agar evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mampu meningkat.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran umum setiap bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, menuangkan rumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti menguraikan landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menuliskan secara rinci jenis penelitian rancangan penelitian, objek penelitian yang akan dilakukan, peneliti juga menuliskan sampel seperti apa yang digunakan, peneliti juga menuliskan prosedur pengambilan data, serta model dan teknis analisis data.

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data penelitian, analisis dan hasil penelitian, serta pembahasan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran yang perlu disampaikan.